

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TAHUN 2024

Jl. Mesjid Agung, No. 02

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 dapat tersusun tepat pada waktunya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banjar, Juni 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar,



IRWAN ADHIWAN S. R., S.STP., M.Si.

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19810501 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3. Program dan Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	54
BAB V PENUTUP	62
5.1. Catatan dalam penyusunan Rencana Kerja	62
5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan	62
5.3. Rencana tindak lanjut	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kota Banjar.....	10
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	23
Tabel 2.4.	Daftar Aset Tetap, Peralatan dan Mesin.....	23
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.....	26
Tabel 2.6.	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kota Banjar	41
Tabel 2.7.	Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	48
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Setelah Perubahan.....	45
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Banjar..	47
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2.	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3
Gambar 1.3.	Tindaklanjut Renja dengan proses penyusunan RAPBD	3

BAB I

PENDAHULUAN

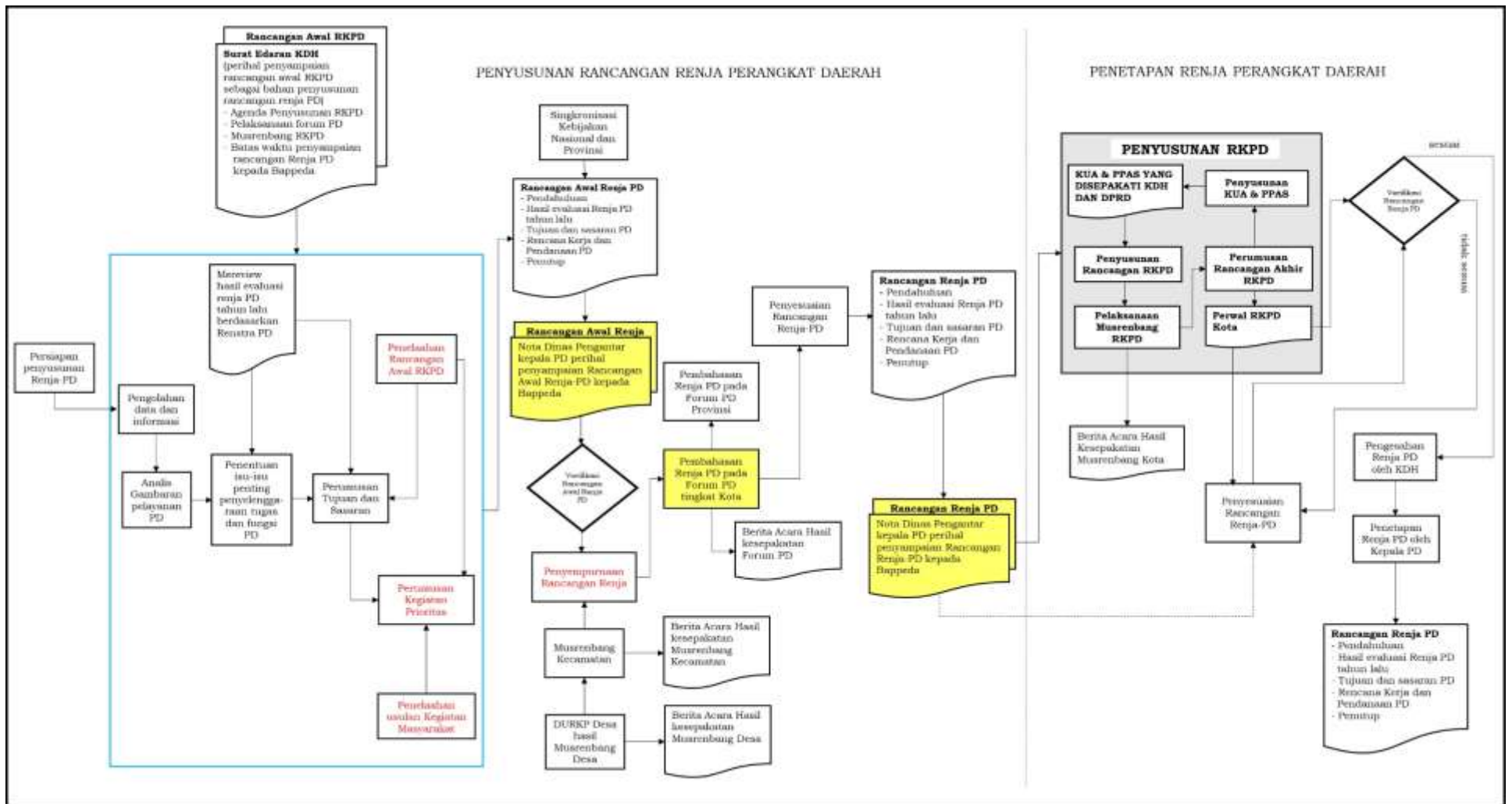
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

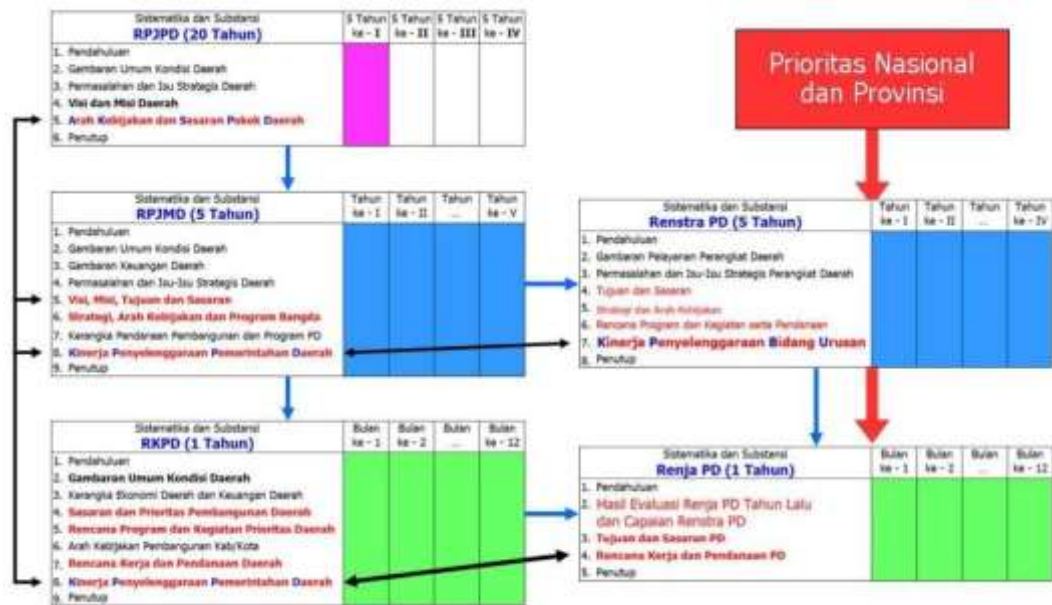
- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Akhir;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah



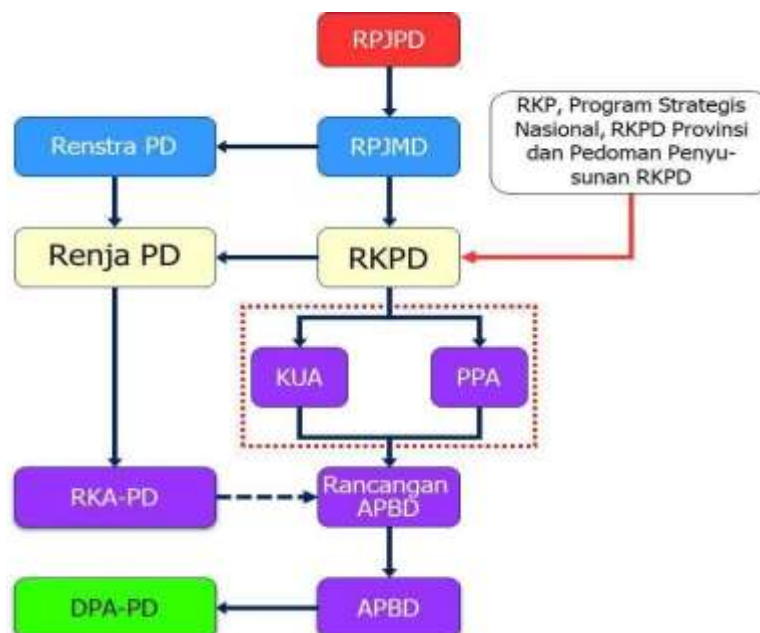
Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja (Renja) Kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3.
Tindak lanjut Rencana Kerja (Renja) dengan proses penyusunan RAPBD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid* 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2022;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
30. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana

- Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Tahun 2022;
33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
 34. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar,
 35. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2);
 36. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 37. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjar, (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);
 38. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6.a tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana strategis perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 6.a);
 39. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk menyediakan suatu dokumen yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.3 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
BAB III	2.4 Penelaahan Usulan Perogram/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat
	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
BAB IV	3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
BAB V	3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	RENCANA KERJA (RENJA) PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memastikan adanya kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan pencapaian Renstra. Selain itu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan pencapaian Renstra bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dijadikan sebagai bahan kebijakan dalam menentukan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun lalu dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Banjar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Keiatan dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2026	RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Targetdan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi CapaianT arget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (tahun 2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.01	Perencanaaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.01.01	Penyusunan doku men Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah doku men Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.5.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan doku men RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.5.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan doku men Perubahan RKA-SKPD	Jumlah doku men Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan doku men Perubahan RKA-SKPD	6 dokumen	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.5.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah doku men DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan doku men DPA-SKPD	6 dokumen	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.5.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah doku men Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan doku men Perubahan DPA-SKPD	6 dokumen	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.5.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	24 laporan	0	0	0	0	8 laporan	8 laporan	100%

1.5.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	0	0	0	0	4 laporan	4 laporan	100%
1.5.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.02.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 org/bln	0	0	0	0	70 org/bln	70 org/bln	100%
1.5.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah doku men Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	0	0	0	0	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.5.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	0	0	0	0	2 laporan	2 laporan	100%
1.5.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah doku men Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.5.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	0	0	0	0	4 laporan	4 laporan	100%
1.5.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	0	0	0	0	1 paket	1 paket	100%
1.5.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah doku men Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.5.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 org	0	0	0	0	1 org.	1 org.	100%
1.5.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 paket	0	0	0	0	12 paket	12 paket	100%
1.5.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 paket	0	0	0	0	12 paket	12 paket	100%
1.5.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 paket	0	0	0	0	12 paket	12 paket	100%
1.5.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	0	0	0	0	12 paket	12 paket	100%
1.5.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	0	0	0	0	12 paket	12 paket	100%
1.5.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah doku men Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	468 dokumen	0	0	0	0	156 dokumen	156 dokumen	100%

1.5.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	100%
1.5.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	100%
1.5.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	0	0	0	0	1 paket	1 paket	100%
1.5.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	100%
1.5.1.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	100%
1.5.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	0	0	0	0	0 unit	0 unit	100%
1.5.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 laporan	0	0	0	0	13 laporan	13 laporan	100%
1.5.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 unit	0	0	0	0	12 unit	12 unit	100%
1.5.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	0	0	0	0	14 unit	14 unit	100%
1.5.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	0	0	0	0	3 unit	3 unit	100%
1.5.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	100%

1.5.2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.2.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	36 kasus	0	0	0	0	12 kasus	12 kasus	100%
1.5.2.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	36 kasus	0	0	0	0	12 kasus	12 kasus	100%
1.5.2.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah doku men hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	3 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.5.2.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah doku men yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	100%
1.5.2.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	150 org	0	0	0	0	50 org	50 org	100%
1.5.2.2.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah doku men hasil Pelaksanaan Kerja Sama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	36 dokumen	0	0	0	0	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.5.2.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	15 unit	0	0	0	0	5 unit	5 unit	100%
1.5.2.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah doku men SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	15 dokumen	0	0	0	0	5 dokumen	5 dokumen	100%

1.5.2.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 laporan	0	0	0	0	1 laporan	1 laporan	100%
1.5.2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	300%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.5.2.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.2.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 laporan	0	0	0	0	12 laporan	12 laporan	100%
1.5.2.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	72 laporan	0	0	0	0	24 laporan	24 laporan	100%
1.5.2.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PNS Poi PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6 0rang	0	0	0	0	4 orang	4 orang	100%
1.5.2.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 org	0	0	0	0	1 org	1 org	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2026), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Diproyeksiakan bahwa tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target pada akhir tahun Renstra.

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang diproyeksikan mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program ini adalah: Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tingkat Capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap akhir tahun periode Renstra sebesar 44%. Adapun capaian kegiatan/sub kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Perkiraan capaian kinerja terhadap capaian akhir tahun Renstra sebesar 33%, didukung dengan sub kegiatan:
 - a) Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja 6 dokumen, perkiraan realisasi 2 dokumen tingkat capaian kinerja sebesar 33%.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan target kinerja 6 dokumen, perkiraan realisasi 2 dokumen persentase capaian kinerja sebesar 33%.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan target kinerja 6 dokumen, perkiraan realisasi 2 dokumen persentase capaian kinerja sebesar 33%.
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan target kinerja 6 dokumen, perkiraan realisasi 2 dokumen

- persentase capaian kinerja sebesar 33%.
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 24 laporan, perkiraan realisasi 8 laporan persentase capaian kinerja sebesar 33%.
 - f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 12 laporan, perkiraan realisasi 4 laporan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan, dengan indikator cakupan administrasi keuangan perangkat daerah diperkirakan tercapai sebesar 33%, didukung dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja 70 orang/bulan, perkiraan realisasi 70 orang/bulan, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target kinerja sebanyak 36 dokumen, perkiraan realisasi kinerja sebesar 12 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 33%.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 6 laporan, perkiraan realisasi 2 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a) Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target kinerja 6 dokumen pengamanan barang milik daerah, perkiraan realisasi 2 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 33%.
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, perkiraan realisasi sebesar 4 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- a) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan

target kinerja sebanyak 2 dokumen, perkiraan realisasi sebesar 1 dokumen, persentase capaian kinerja sebesar 50%

- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja sebanyak 1 orang pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan, capaian kinerja belum tercapai, realisasi 3 orang, persentase capaian kinerja sebesar 33%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja sebanyak 36 paket komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan, perkiraan realisasi sebanyak 12 paket persentase capaian kinerja sebesar 33%.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja sebanyak 36 paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, perkiraan realisasi sebanyak 12 paket, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target kinerja sebanyak 36 paket peralatan rumah tangga yang disediakan, perkiraan realisasi sebanyak 12 paket, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja sebanyak 36 paket bahan logistik kantor yang disediakan, perkiraan realisasi sebanyak 12 paket, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja sebanyak 36 paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, perkiraan realisasi sebanyak 12 paket, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja sebanyak 36 paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan, terealisasi sebanyak 12 paket, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - g) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan target kinerja sebanyak 36

- laporan fasilitasi kunjungan tamu perkiraan realisasi sebanyak 12 paket, tingkat realisasi sebesar 33%.
- h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja sebanyak 36 laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD perkiraan realisasi sebanyak 12 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target sebanyak 1 unit perkiraan realisasi 1 unit Tingkat realisasi sebesar 100%.
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 6 unit, perkiraan realisasi sebanyak 5 unit, Tingkat capaian kinerja sebesar 83%.
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sebanyak 10 unit, realisasi 10 unit, tingkat realisasi sebesar 100%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target 36 laporan penyediaan jasa surat menyurat, realisasi 12 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja sebanyak 36 laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan terealisasi sebanyak 12 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja sebanyak 39 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, terealisasi sebanyak 13 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- target kinerja 42 unit kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, realisasi 14 unit, tingkat realisasi sebesar 33%.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 36 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perijinannya, realisasi 12 unit, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja 3 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, realisasi 1 unit, tingkat realisasi sebesar 33%.
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, dengan target kinerja sebanyak 36 kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, terealisasi sebanyak 12 kasus, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - b) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa dengan target kinerja sebanyak 36 kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa yang dilakukan penindakan, terealisasi sebanyak 12 kasus, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota,

dengan target kinerja sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen, tingkat realisasi sebesar 33 %.

- d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja jumlah anggota Linmas, target 36 dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terealisasi 12 dokumen, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM, dengan target kinerja 150 orang SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM yang ditingkatkan kapasitasnya, terealisasi 50 orang, tingkat realisasi sebesar 33%.
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan sub kegiatan:
- a) Sosialisasi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dengan target kinerja sebanyak 36 laporan pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, terealisasi 12 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan sasaran kinerja jumlah operasional pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota sebanyak 36 laporan hasil pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota laporan, terealisasi sebanyak 12 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
 - c) Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dengan sasaran kinerja jumlah operasional penanganan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 72 laporan hasil penanganan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati/Walikota terealisasi sebanyak 24 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan sub

kegiatan:

- a) Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS, dengan target kinerja sebanyak 3 laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, terealisasi sebanyak 1 laporan, tingkat realisasi sebesar 33%.
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Diproyeksiakan bahwa tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target pada akhir tahun Renstra.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
 - a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain:
 - 1) Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
 - 2) Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
 - 3) Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Implikasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2024 terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah menyebabkan adanya progress percepatan capaian kinerja perangkat daerah dan serapan anggaran terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, yang merupakan kondisi akhir yang diharapkan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil agar target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat tercapai

antara lain:

- a. Melakukan perbaikan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil review Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.
- b. Menyusun program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
- c. Meningkatkan dukungan anggaran terhadap program/kegiatan/sub kegiatan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebanyak 166 orang, dengan komposisi terdiri dari 70 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 96 orang Tenaga Harian Lepas (TKHL). Di bawah ini ditampilkan rincian sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar berdasarkan:

➤ Pendidikan

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	10 orang
2.	Sarjana	55 orang
3.	Diploma 3	1 orang
4.	Diploma 2	1 orang
5.	SMA/Sederajat	98 orang
6.	SMP/Sederajat	1 orang
7.	SD	0 orang
Jumlah		166 orang

➤ Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I, IV/b	1 orang
2.	Pembina, IV/a	2 orang
3.	Penata Tingkat I, III/d	6 orang
4.	Penata, III/c	2 orang
5.	Penata Muda Tingkat I, III/b	8 orang
6.	Penata Muda, III/a	14 orang
7.	Pengatur Tingkat I, II/d	23 orang
8.	Pengatur, II/c	0 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2 orang
10.	Pengatur muda, II/a	12 orang
11.	Non PNS	96 orang
Jumlah		166 orang

b. Asset/Modal

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selama ini didukung dengan sarana prasarana yang juga merupakan asset yang dikelola Satuan Polisi PAmong Praja. Saat ini sumber daya aset Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari asset bergerak dan asset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diembannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipaparkan rincian sarana prasarana pendukung sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset Tetap, Peralatan dan Mesin

NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
Alat-alat Angkutan		Unit
- Sedan	1	Unit
- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6	Unit
- Sepeda Motor	14	Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga		Buah
- Lemari Kaca	4	Buah
- Lemari Besi/Metal	1	Buah
- Rak Kayu	7	Buah
- <i>Filling Cabinet</i> Besi	19	Buah
- Band Kas	1	Buah
- Lemari kayu	6	Buah
- Alat Penghancur Kertas	0	Buah
- <i>Owerhead Projektor</i>	1	Buah
- Alat Kantor Lainnya (Bass Speaker,	2	Buah

Lampu Rotari)		
- LCD <i>Projector/Infocus</i>	2	Buah
- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	Buah
- Meja ½ Biro	4	Buah
- Meja Kerja Kayu	20	Buah
- Kursi Besi/Metal	18	Buah
- Sofa	2	Buah
- Kursi Tamu	1	Buah
- Kursi Putar	8	Buah
- Lemari Es	1	Buah
- A.C. <i>Split</i>	6	Buah
- <i>Tape Recorder</i> (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Buah
- Televisi	5	Buah
- Megaphone	1	Buah
- Unit Power Supply	1	Buah
- Kursi Meja Pejabat Lainnya	28	Buah
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		Buah
- Photo Tustel	0	Buah
- <i>Camera Digital</i>	2	Buah
- Repeater RX/TX	1	Buah
- Unit Transceiver SSB Portable	0	Buah
- Antena SHF Stationary	1	Buah
Alat-alat Kedokteran		Buah
- Senter	25	Buah
Alat Laboratorium		Buah
- Meja Kerja	20	Buah
- Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian Lainnya (dst)	8	Buah
- Rotator	2	Buah
Alat-alat Perenjataan		Buah
- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Buah
- Sangkur	17	Buah
- Helmet	20	Buah
- Anti Riot Uniform/Romi PHH	15	Buah
- Tameng	20	Buah
Alat Besar		Buah
- <i>Veld Bed</i>	4	Buah
Komputer		Unit
- P.C Unit	11	Unit
- Laptop	17	Unit
- <i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	19	Unit
Rambu-Rambu		Buah
- <i>Traffic Light</i>	8	Buah
Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
- Sepeda Motor	8	Unit
- Kendaraan Model Off Road / Jeef	1	Unit
- Mini Bus	3	Unit
- Truk Kecil	2	Unit
- Truk Sedang	1	Unit
- Truk Besar	1	Unit

- Ruang Kerja	10	Buah
- Pos Jaga	2	Buah
- Ruang Layanan Pengaduan dan - Pemeriksaan	1	Buah
- Gudang	1	Buah
- Sekretariat PPNS	1	Buah
- Ruang Sidang Kode Etik	1	Buah
- Tempat Upacara	1	Buah
- Tempat Parkir	1	Buah
- Tonfa	15	Buah
- Borgol	15	Buah
- Ferplas	10	Buah
- Tas Ransel	170	Buah
- Jaket	170	Buah
- Rompi	20	Buah
- Pakaian Dinas	170	Buah
- Matras	5	Buah
- Alat Kebencanaan	8	Buah
- Alat Komunikasi	38	Buah
- Tenda	1	Buah

2. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar membuat suatu program inovatif yang diterapkan semenjak tahun 2017. Adapun program tersebut adalah Patroli Edukasi terhadap Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta Gerakan Disiplin Siswa Sekolah yang disingkat "**PADUDA KETEMU GADIS**". Program inovatif tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap warga masyarakat Kota Banjar melalui kegiatan rutin patroli wilayah tentang Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta melakukan penegakan disiplin terhadap siswa sekolah yang ada di wilayah Kota Banjar. Selain itu pada Tahun 2023 ada juga Inovasi **SAPI PERAH** singkatan dari **S**osialisAsi dan **P**enyampaian Informasi **P**enegakan pEraturan dae**RAH**. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

3. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan urusannya.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional		Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional	IKK	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pencapaian penerima layanan dasar:	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capain sesuai dengan target
2	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar :	100%	-	100%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	100%	Capaian belum mencapai target dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi
3	Persentase gangguan tratribum yang diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	-	Capain sesuai dengan target
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	-	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	-	Capain sesuai dengan target

Berdasarkan tabel tersebut di atas, hasil pengukuran terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan menggunakan parameter Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capain kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terhadap penerapan SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 berdasarkan indikator :

a. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar

Target capaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebesar 100% setiap tahunnya. Adapun Capaian tahun 2023 dan 2024 sebesar 100% setiap tahunnya, sedangkan proyeksi capaian kinerja ahun 2025 dan tahun 2026 sebesar 100% setiap tahunnya.

b. Persentase Pencapaian mutu Minimal Layanan dasar

Target capaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebesar 100% setiap tahunnya. Adapun Capaian tahun 2023 dan 2024 sebesar 98% setiap tahunnya, sedangkan proyeksi capaian kinerja ahun 2025 sebesar 98% dan tahun 2026 sebesar 100% setiap.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target capaian tahun 2023 sebesar 95% dan tahun 2024 sebesar 98%teralisasi sebsesar 100% (melebihi target). sampai dengan tahun 2026 sebesar 100% setiap tahunnya. Adapun Capaian tahun 2023 dan 2024 sebesar 98% setiap tahunnya, sedangkan proyeksi capaian kinerja ahun 2025 sebesar 98% dan tahun 2026 sebesar 100% setiap

Capain kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah urusan ketenteraman dan ketertiban umum dihitung berdasarkan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan dan persentase Perda dan Perkada yang ditegakan. Adapun capaian untuk kedua indikator tersebut yaitu :

a. Pesentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Target capaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebesar

100% setiap tahunnya. Adapun Capaian tahun 2023 dan 2024 sebesar 100% setiap tahunnya, sedangkan proyeksi capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2026 sebesar 100% setiap tahunnya.

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan.

Target capaian tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebesar 100% setiap tahunnya. Adapun Capaian tahun 2023 dan 2024 sebesar 100% setiap tahunnya, sedangkan proyeksi capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2026 sebesar 100% setiap tahunnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam pelayanan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, maka ditemukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar yang harus menjadi perhatian semua pihak. Adapun isu-isu tersebut yaitu:

- a. Meningkatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Meningkatnya pelanggaran Perda dan Perkada.
- c. Rendahnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat.
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

Dengan adanya isu-isu tersebut, maka menjadi tantangan ke depan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus ASN;
- b. Keterbatasan sumber daya anggaran;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;

3. Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan

Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjar terutama dalam mewujudkan Tujuan ke 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Tujuan K2 6.1. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kewaspadaan Bencana. Kontribusi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terdapat pada keberhasilan dalam penerapan dan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, serta keberhasilan dalam mencapai target dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pada sisi lain keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdampak terhadap kondusifitas wilayah, sehingga memungkinkan Pemerintah Kota Banjar dapat melaksanakan pembangunan tanpa adanya hambatan dalam pelaksanaannya yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisa terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, maka ditemukan tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dimasa yang akan datang dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu:

a. Tantangan

- Meningkatnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Rendahnya kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Praja dan Linmas;
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
- Keterbatasan jumlah anggota serta sarana dan prasarana operasional.

b. Peluang

- Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam setiap kegiatan;
- Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Banjar;
- Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang tenteram dan tertib.

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Untuk menghadapi isu-isu penting yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, maka disusun formulasi-formulasi yang digunakan untuk menindaklanjutinya melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada, antara lain:

- a. Penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan Perda dan Perkada;
- c. Peningkatan kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah serta pelaporan kinerja perangkat daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses yang dilakukan dalam riview terhadap Rancangan Akhir RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses tersebut dilakukan adalah dalam upaya mensinergikan perencanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif yang terdapat dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Banjar Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah. Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Banjar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.726.996.448	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.786.996.448
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.726.996.448	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.786.996.448
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Banjar	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	9.995.371.632	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Banjar	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	10.055.371.632		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.900.000	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan	
1.05.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan	
1.05.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan	
1.05.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan	
1.05.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan	

1.05.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 laporan	3.500.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.500.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.811.113.705	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.811.113.705	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org/bln	7.807.913.705	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org/bln	7.807.913.705	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.600.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.600.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	38.100.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	38.100.000	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banjar	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	35.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banjar	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	35.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.600.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.500.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6.500.000	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Banjar	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Banjar	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.500.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 org.	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 org.	5.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	203.912.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	203.912.600	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2.200.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	45.412.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	45.412.600	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.200.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	16.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	16.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	17.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	17.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Banjar	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Banjar	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 dokumen	20.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.100.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	70.000.000	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	60.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.5.1.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	1 unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	1 unit	10.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.668.255.361	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.668.255.361	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	51.450.011	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	51.450.011	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	1.615.805.350	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	1.615.805.350	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	239.589.966	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	239.589.966	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.19.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	145.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	145.160.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

1.05.01.2.19.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baiaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	74.429.966	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baiaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	74.429.966	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.19.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.01.2.19.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	1.731.624.816	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	1.731.624.816	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjar	Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	100%	671.455.234	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjar	Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	100%	671.455.234	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.000 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Banjar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Banjar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.000 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	10.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	10.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan

1.05.02.2.01.000 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kota Banjar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 org	24.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kota Banjar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 org	24.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.000 6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	94.000.000	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	94.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.000 8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Banjar	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	5 dokumen	5.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Banjar	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	5 dokumen	5.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Banjar	jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1 Orang	2.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Banjar	jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1 Orang	2.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 1	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP	Kota Banjar	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 orang	1.900.000	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP	Kota Banjar	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 orang	1.900.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kota Banjar	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	1 Orang	1.857.234	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kota Banjar	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	1 Orang	1.857.234	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan

1.05.02.2.01.001 3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Banjar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1.800.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Banjar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kota Banjar	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	1 Orang	1.800.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kota Banjar	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	1 Orang	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Banjar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan	450.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Banjar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan	450.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Kota Banjar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	12 laporan	14.098.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Kota Banjar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	12 laporan	14.098.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	10.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	10.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.01.001 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 unit	5.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 unit	5.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	1.026.767.382	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	1.026.767.382	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

1.05.02.2.02.000 6	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Pwarkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kota Banjar	Jumlah sarana dan prasarana penegakan Peraturan Daerah	1 unit	2.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Pwarkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kota Banjar	Jumlah sarana dan prasarana penegakan Peraturan Daerah	1 unit	2.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02.000 4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.800.000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02.000 5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	1.800.000	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02.000 7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.800.000	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02.000 8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 Laporan	1.800.000	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 Laporan	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02.000 9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	1.800.000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02.001 0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	379.000.540	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	379.000.540	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.02.001 1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	621.766.842	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	621.766.842	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

1.05.02.2.02.001 2	Pengawasan atas Ketaatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Ketaatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	15.000.000	Pengawasan atas Ketaatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Ketaatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	15.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PNS Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	100%	33.402.200	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PNS Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	100%	33.402.200	Kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.03.000 6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Luar Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	26.002.200	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Luar Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	26.002.200	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.03.000 2	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kota Banjar	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1.800.000	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kota Banjar	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.03.000 3	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.800.000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.03.000 4	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	1.800.000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Banjar	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	1.800.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
1.05.02.2.03.000 5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	2.000.000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kota Banjar	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	2.000.000	Sub kegiatan cocok antara Ranwal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan
Total Anggaran					11.726.996.448	Total Anggaran					11.786.996.448

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Kota Banjar Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan sehingga menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kota Banjar Tahun 2025, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan tersebut terdapat pada jumlah pagu anggaran. Jumlah pagu anggaran pada RKPD sebesar Rp. 11.726.996.448 sedangkan pagu anggaran berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 11.786.996.448.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan, forum perangkat daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota serta Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diusulkan atas hasil reses.

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan menindaklanjuti Daftar Usulan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Desa (DU-RKP Desa) serta Daftar Usulan Kelurahan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pelatihan Linmas	Desa Cibeureum, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
2	Pelatihan Linmas	Desa Cibeureum, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak
3	Pelatihan Linmas	Desa Kujangsari, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
4	Pelatihan Linmas	Tersebar se-Kelurahan Hegarsari Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
5	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Muktisari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak
6	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Muktisari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak
7	Pelatihan Linmas	Desa Raharja, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
8	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Muktisari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak
9	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Muktisari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak
10	Pelatihan Linmas	Kelurahan Muktisari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras BKL	1 kali	Ditolak
11	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Kelurahan Muktisari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Posyandu	1 kali	Ditolak
12	Pelatihan Linmas	Desa Neglasari, Kota Banjar, Banjar, Neglasari, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
13	Pelatihan Linmas	Desa Neglasari, Kota Banjar, Banjar, Neglasari, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
14	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Desa Neglasari, Kota Banjar, Banjar, Neglasari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak
15	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Desa Neglasari, Kota Banjar, Banjar, Neglasari, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak

16	Pelatihan Linmas	Desa Rejasari, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
17	Pelatihan Linmas	Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
18	Pelatihan Linmas	Desa Sukamukti, Kota Banjar	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	1 kali	Diakomodir
19	Sarana dan Prasarana Perlindungan Masyarakat	Desa Sukamukti, Kota Banjar	Terlaksaksanya pengadaan sarpras Linmas	1 kali	Ditolak

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kota maka diperoleh beberapa usulan dari para pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Jumlah usulan kegiatan hasil aspirasi masyarakat sebanyak 19. Secara umum usulan-usulan tersebut diklasifikasikan menjadi 2 jenis usulan, yaitu usulan pelatihan dan usulan sarana dan prasarana Linmas. Untuk usulan pelatihan Linmas diakomodir dengan catatan volume kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, sedangkan usulan sarana dan prasana perlindungan masyarakat ditolak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional. Keempat pilar tersebut yaitu:

- a. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- b. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- c. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- d. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dari ke 4 (empat) pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Adapun 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu pada pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Untuk mendukung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 yaitu:

- Tujuan ke-1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
- Tujuan ke-2 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan hasil yang diperoleh dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Adapun perumusan sasaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- Sasaran ke-1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
- Sasaran ke-2 : Menurunnya Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Sasaran ke-3 : Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada

Selanjutnya tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 untuk setiap sasaran yang ingin dicapai disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%
		Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94% (30 pelanggaran)	88% (28 pelanggaran)	81% (26 pelanggaran)
		Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	97% (28 kasus)	93% (27 kasus)	90% (26 kasus)
2	Meningkatkan kualitas tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja		Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	BB

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu penyusunan rencana program dan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menjadi prioritas serta isu strategis, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan difokuskan terhadap upaya untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Penerapan dan pencapaian mutu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.
3. Mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar merencanakan sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan. Secara keseluruhan sifat penyebaran program/kegiatan/sub kegiatan tersebar di wilayah Kota Banjar, hanya ada beberapa program/kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di luar Kota Banjar. Total pagu indikatif sebesar **Rp. 11.726.996.448.** dengan rincian anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota **Rp 9.995.371.632** dan anggaran untuk program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebesar **Rp 1.731.624.816.** Berikut ini rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 :

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub /Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Banjar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.741.996.448		Rankhir RKPD		11.263.205.024
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.726.996.448		Rankhir RKPD		11.263.205.024
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Banjar	100%	9.995.371.632		Rankhir RKPD	100%	9.818.119.490
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	17.900.000		Rankhir RKPD	100%	8.500.000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	2 dokumen	3.500.000	DAU	Rankhir RKPD	2 dokumen	1.500.000
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	1.600.000	DAU	Rankhir RKPD	2 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	1.600.000	DAU	Rankhir RKPD	2 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	1.600.000	DAU	Rankhir RKPD	2 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	1.600.000	DAU	Rankhir RKPD	2 dokumen	1.000.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Kota Banjar	8 laporan	3.500.000	DAU	Rankhir RKPD	8 laporan	1.000.000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	4 laporan	4.500.000	DAU	Rankhir RKPD	4 laporan	2.000.000

1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	7.811.113.705		Rankhir RKPD	100%	7.808.913.705
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjar	70 org/bln	7.807.913.705	PAD, DBH, DAU	Rankhir RKPD	70 org/bln	7.807.913.705
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah doku men Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	12 dokumen	1.600.000	DAU	Rankhir RKPD	12 dokumen	0
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	2 laporan	1.600.000	DAU	Rankhir RKPD	2 laporan	1.000.000
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	38.100.000		Rankhir RKPD	100%	5.000.000
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah doku men Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	35.000.000	DBH	Rankhir RKPD	2 dokumen	4.000.000
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	4 laporan	1.600.000	DAU	Rankhir RKPD	4 laporan	1.000.000
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	12 laporan	1.500.000	DAU	Rankhir RKPD	12 laporan	0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	6.500.000		Rankhir RKPD	100%	5.000.000
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Banjar	1 dokumen	1.500.000	DAU	Rankhir RKPD	1 dokumen	0
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Banjar	1 org.	5.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 org.	5.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	203.912.600		Rankhir RKPD	100%	171.000.000
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Banjar	12 paket	2.200.000	DAU	Rankhir RKPD	12 paket	1.000.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Banjar	12 paket	45.412.600	DAU	Rankhir RKPD	12 paket	44.000.000
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Banjar	12 paket	2.200.000	DAU	Rankhir RKPD	12 paket	1.000.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Banjar	12 paket	16.000.000	DAU	Rankhir RKPD	12 paket	5.000.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Kota Banjar	12 paket	17.000.000	DAU	Rankhir RKPD	12 paket	10.000.000
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah doku men Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Banjar	156 dokumen	20.000.000	DAU	Rankhir RKPD	156 dokumen	19.000.000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjar	12 laporan	1.100.000	DAU	Rankhir RKPD	12 laporan	1.000.000

1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjar	12 laporan	100.000.000	DAU	Rankhir RKPD	12 laporan	90.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjar	100%	10.000.000		Rankhir RKPD	100%	0
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Banjar	1 unit	5.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 unit	0
1.5.1.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Banjar	1 unit	5.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 unit	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	100%	1.668.255.361		Rankhir RKPD	100%	1.665.805.350
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	12 laporan	1.000.000	DAU	Rankhir RKPD	12 laporan	1.000.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Banjar	12 laporan	51.450.011	DBH	Rankhir RKPD	12 laporan	49.000.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Banjar	13 laporan	1.615.805.350	DBH	Rankhir RKPD	13 laporan	1.615.805.350
1.05.01.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	100%	239.589.966		Rankhir RKPD	100%	153.900.435
1.05.01.2.19.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Banjar	12 unit	145.160.000	Pendapatan Bagi Hasil	Rankhir RKPD	12 unit	60.900.435
1.05.01.2.19.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Banjar	14 unit	74.429.966	DAU	Rankhir RKPD	14 unit	93.000.000
1.05.01.2.19.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Banjar	5 unit	5.000.000	DAU	Rankhir RKPD	5 unit	0
1.05.01.2.19.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Banjar	1 unit	15.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 unit	0
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%	1.731.624.816		Rankhir RKPD	100%	1.445.085.534
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		100%			Rankhir RKPD	100%	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	Kota Banjar	100%	671.455.234		Rankhir RKPD	100%	665.043.334
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kota Banjar	1 dokumen	50.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 dokumen	50.000.000

1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	4 dokumen	10.000.000	DAU	Rankhir RKPD	4 dokumen	10.000.000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Banjar	50 org	24.000.000	PAD	Rankhir RKPD	50 org	25.000.000
1.05.02.2.01.0006	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Banjar	12 dokumen	94.000.000	PAD	Rankhir RKPD	12 dokumen	94.000.000
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Kota Banjar	5 dokumen	5.000.000	PAD	Rankhir RKPD	5 dokumen	5.000.000
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kota Banjar	1 Orang	2.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Orang	0
1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Kota Banjar	1 orang	1.900.000	DAU	Rankhir RKPD	1 orang	0
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Kota Banjar	1 Orang	1.857.234	DAU	Rankhir RKPD	1 Orang	0
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Banjar	1 Orang	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Orang	0
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kota Banjar	1 Orang	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Orang	0
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kota Banjar	12 laporan	450.000.000	DAU	Rankhir RKPD	12 laporan	451.043.334
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melauai Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan penindakan	Kota Banjar	12 laporan	14.098.000	DAU	Rankhir RKPD	12 laporan	15.000.000

1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Banjar	1 laporan	10.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 laporan	10.000.000
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Banjar	5 unit	5.000.000	DAU	Rankhir RKPD	5 unit	5.000.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Kota Banjar	100%	1.026.767.382		Rankhir RKPD	100%	754.040.000
1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Peworkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah sarana dan prasarana penegakan Peraturan Daerah	Kota Banjar	1 unit	2.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 unit	0
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	1 Laporan	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Laporan	0
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	1 Dokumen	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Dokumen	0
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	1 Laporan	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Laporan	0
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kota Banjar	1 Laporan	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Laporan	0
1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Kota Banjar	1 Dokumen	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Dokumen	0
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	12 laporan	379.000.540	DBH CHT	Rankhir RKPD	12 laporan	379.040.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	24 laporan	621.766.842	DBH CHT	Rankhir RKPD	24 laporan	360.000.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	12 laporan	15.000.000	DAU	Rankhir RKPD	12 laporan	15.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PNS Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS		100%	33.402.200		Rankhir RKPD	100%	26.002.200
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Luar Kota Banjar	1 laporan	26.002.200	DAU	Rankhir RKPD	1 laporan	26.002.200

1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kota Banjar	1 Dokumen	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Dokumen	0
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Banjar	1 Dokumen	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 Dokumen	0
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Banjar	1 laporan	1.800.000	DAU	Rankhir RKPD	1 laporan	0
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kota Banjar	1 laporan	2.000.000	DAU	Rankhir RKPD	1 laporan	0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Jumlah program dan kegiatan yang terkait langsung dengan urusan pemerintah daerah sebanyak 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan untuk kegiatannya sebanyak 3 (tiga) kegiatan antara lain:
 1. Penanganan Ketentraman dan Ketertiban 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
- b) Jumlah program dan kegiatan yang bersifat penunjang terhadap urusan pemerintahan daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan kegiatannya sebanyak 8 (delapan) kegiatan, antara lain:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- c) Adanya Perbedaan Antara Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD diantaranya yaitu Pada Rancangan Awal RKPD terdapat 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 10.789.129.134 berbeda dengan Rancangan Akhir RKPD yaitu 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp.11.726.996.448. Perbedaan ini didasari dengan Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025, disusun berdasarkan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta dengan memperhatikan usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD, yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan maju tahun 2026.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang menjadi prioritas serta isu strategis pemerintah daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan difokuskan terhadap upaya penanganan terhadap isu strategis tersebut, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Adapun rumusan Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada Tahun 2025 dibuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR
TAHUN 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	PENERIMA MANFAAT	INDIKATOR KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	SUMBER ANGGARAN	KETERANGAN
				OUT PUT KEGIATAN					
				TOLAK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.726.996.448	11.263.205.024		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.726.996.448	11.263.205.024		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Banjar	Aparatur	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	9.995.371.632	9.818.119.490		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.900.000	8.500.000		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	1.500.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.600.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja

1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 laporan	3.500.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.500.000	2.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.811.113.705	7.808.913.705		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org/bln	7.807.913.705	7.807.913.705	PAD, DBH, DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah doku men Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.600.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.600.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	38.100.000	5.000.000		
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah doku men Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	35.000.000	4.000.000	DBH	Usulan Renja
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.600.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.500.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	6.500.000	5.000.000		
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.500.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 org.	5.000.000	5.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	203.912.600	171.000.000		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	2.200.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja

1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	45.412.600	44.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.200.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	16.000.000	5.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	17.000.000	10.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah doku men Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 dokumen	20.000.000	19.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.100.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	90.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.000.000	0		
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000	0	DAU	Usulan Renja
1.5.1.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	1 unit	5.000.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.668.255.361	1.665.805.350		
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	1.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	51.450.011	49.000.000	DBH	Usulan Renja
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	1.615.805.350	1.615.805.350	DBH	Usulan Renja
1.05.01.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	239.589.966	153.900.435		

1.05.01.2.19.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	145.160.000	60.900.435	Pendapatan Bagi Hasil	Usulan Renja
1.05.01.2.19.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baiaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	74.429.966	93.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.19.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5.000.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.01.2.19.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	1.731.624.816	1.445.085.534		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%				
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjar		Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	100%	671.455.234	665.043.334		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 org	24.000.000	25.000.000	PAD	Musrenbang, SPM dan Usulan Renja

1.05.02.2.01.0006	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	94.000.000	94.000.000	PAD	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	5 dokumen	5.000.000	5.000.000	PAD	SPM dan Usulan Renja
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Banjar	Masyarakat/ Aparatur	jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1 Orang	2.000.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 orang	1.900.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	1 Orang	1.857.234	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kota Banjar	Masyarakat/ Aparatur	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	1 Orang	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan	450.000.000	451.043.334	DAU	Usulan Renja

1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa yang dilakukan penindakan	12 laporan	14.098.000	15.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	10.000.000	10.000.000	DAU	Usulan renja
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Banjar	Masyarakat/ Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 unit	5.000.000	5.000.000	DAU	Usulan renja
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	1.026.767.382	754.040.000		
1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Peworkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kota Banjar	Masyarakat/ Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana penegakan Peraturan Daerah	1 unit	2.000.000	0	DAU	SPM dan Usulan Renja
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 Laporan	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan	12 laporan	379.000.540	379.040.000	DBH CHT	Usulan Renja

				Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	621.766.842	360.000.000	DBH CHT	Usulan Renja
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Banjar	Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	15.000.000	15.000.000	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			Jumlah PNS Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	100%	33.402.200	26.002.200		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Luar Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	26.002.200	26.002.200	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kota Banjar	Aparatur	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	1.800.000	0	DAU	Usulan Renja
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kota Banjar	Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan	2.000.000	0	DAU	Usulan Renja
JUMLAH USULAN RENJA (1)						58			
JUMLAH USUSLAN MUSRENBANG (2)						1			
JUMLAH USULAN POKIR (3)						0			
JUMLAH TOTAL (1+2+3)						59			

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan dengan memperhatikan, mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD, RPJMD, RKPD Kota Banjar dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026, oleh sebab itu maka Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2024. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dapat tercapai.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun berdasarkan RKPD Kota Banjar Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap analisis kebutuhan.
- c. Perencanaan bersifat akomodatif terhadap berbagai usulan masyarakat yang tertuang dalam Musrenbang serta usulan dari para pemangku kepentingan

serta dengan memperhatikan pokok-pokok fikiran dari legislative.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 ini, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam Rencana Kerja (Renja) Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2025 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjar.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar ini disusun sebagai acuan kerja tahun 2025. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah kita.

Banjar, Juni 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar



IRWAN ADHIWAN S R, S.STP., M.Si.

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19810501 199912 1 001